

KATALIS DANANTARA DI PASAR MODAL

Bisnis, JAKARTA — Rencana pemerintah meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dipandang menjadi katalis positif bagi pasar modal. Kendati demikian, publik masih mempertanyakan transparansi dan pengawasan di lembaga itu.

Annisa Kurniasari Saumi & Dionisio Damara Tonce
redaksi@bisnis.com

Bagi lembaga perbankan dan investasi seperti JP Morgan, pembentukan Danantara dipandang dapat memberikan katalis positif di pasar modal Indonesia. Beberapa negara telah melakukan langkah yang sama untuk menarik minat para investor.

Executive Director JP Morgan Indonesia Henry Wibowo menjelaskan apabila eksekusi terhadap BPI Danantara ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka strategi pemerintah ini dapat menjadi nilai tambah bagi Indonesia.

"Saya sebenarnya cukup positif terhadap Danantara. Jika eksekusinya baik, jika dapat dilaksanakan dengan baik, dengan tim yang baik juga, Danantara bisa potensial menjadi *value up* untuk Indonesia," katanya, Kamis (20/2).

Secara contoh, Korea Selatan juga baru-baru ini melakukan inisiatif yang sama. Hal itu terbukti dapat mendorong kinerja pasar modal di sana.

Menurutnya, Danantara juga dapat meningkatkan potensi keuntungan (*leverage up*) dengan menggunakan asetnya untuk memperoleh lebih banyak dana seperti US\$20 miliar. Apabila US\$1-US\$3 miliar di antaranya dipakai untuk mendukung pasar modal maka Danantara dapat mendorong pertumbuhan pasar modal. "Itu dari sesuatu hal yang mungkin banyak tanda tanya, akan bisa menjadi katalis positif," ucapnya.

Meski demikian, kata dia, JP Morgan masih melihat bagaimana detail dari kejelasan investasi Danantara, agar bisa mengukur dampak dari kehadiran Danantara. Senada, penyedia indeks pasar

global FTSE Russell melihat kehadiran Danantara menjadi perkembangan yang sangat menarik dari Indonesia. FTSE Russell berpandangan lembaga itu dapat mendatangkan investasi asing atau *foreign direct investment* (FDI) ke Indonesia.

Policy Director FTSE Russell Wanming Du mengatakan dengan dana kelolaan atau *asset under management* (AUM) yang diperkirakan sebesar US\$900 miliar, Danantara menjadi "pemain" yang cukup signifikan.

Secara global, Danantara akan menjadi *sovereign wealth fund* (SWF) dengan pengelolaan dana terbesar ketujuh di dunia.

"Investasi ini akan mendukung pertumbuhan dan menarik banyak minat dari investor asing, termasuk FDI. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan, peningkatan kapitalisasi pasar, serta meningkatkan bobot negara tersebut dalam indeks," kata Du.

Lebih lanjut, Du memperkirakan Danantara bakal berinvestasi sebagian besar ke sektor infrastruktur dan mendukung ekonomi domestik. BPI ini juga diproyeksi dapat berinvestasi dalam proyek energi terbarukan. Bila benar, kemungkinan tersebut menjadi kabar baik bagi pasar domestik.

"Sebagai penyedia indeks, saya ingin menyoroti bahwa terkadang akan lebih baik untuk mengimbangi investasi ini dengan dana ekuitas, misalnya dengan melihat

peluang investasi di luar negeri," ujar Du.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Danantara mendapat suntikan modal yang sangat besar, dengan aset senilai US\$900 miliar dan penge-

lolaan dana sekitar US\$100 miliar. "Dengan profit dari ini, kita bisa dengan mudah menggalang dana sekitar US\$20-US\$25 miliar, sehingga kita bisa berinvestasi sendiri," ujar Luhut.

Pun begitu lanjut Luhut, yang lebih penting adalah bahwa Danantara memungkinkan untuk membentuk *joint venture* (JV) dengan perusahaan luar negeri. Dia juga menegaskan BPI ini tidak akan dikelola oleh orang-orang yang hanya "titip nama" atau direkomendasikan oleh pihak tertentu, karena dijalankan oleh perusahaan profesional.

PENGAWASAN

Meski mendapat sambutan positif, publik masih mempertanyakan tata kelola Danantara yang segera direvisi pada 24 Februari 2025.

Di platform media sosial X misalnya, Danantara menjadi salah satu perbincangan warganet. Tak sedikit yang menyoroti bahwa lembaga baru ini berisiko lantaran adanya penerapan aturan *business judgement rule* (BJR).

Melansir Kemenku Learning Center, BJR adalah prinsip hukum yang diadopsi dari *common law* di Amerika Serikat. BJR melindungi direksi BUMN dari risiko penuntutan hukum atas keputusan bisnis yang ditempuh.

Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), menuturkan bahwa tata kelola BPI Danantara cukup kuat karena banyak pihak yang terlibat dalam pengawasan.

Secara organisasi, katanya, Danantara diawasi oleh berbagai pihak, termasuk Dewan Pengawas yang terdiri atas Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan pejabat tinggi lainnya yang ditunjuk langsung oleh Presiden.

Selain itu, *superholding* Danantara juga memiliki kewajiban untuk melaporkan rencana bisnisnya kepada DPR



Jika eksekusinya baik, jika dapat dilaksanakan dengan baik, dengan tim yang baik juga, Danantara bisa potensial menjadi *value up* untuk Indonesia.

guna mendapatkan persetujuan.

"Dalam implementasi rencana bisnis, ada pengawasan ketat terhadap realisasi yang dijalankan. Jika terdapat penyimpangan dari rencana yang telah disepakati, hal tersebut harus menjadi perhatian utama," ujar Toto.

Begitupun, Dewan Pengawas turut bertanggung jawab untuk memastikan realisasi rencana bisnis tetap sesuai jalur. Selain itu, DPR berwenang menugaskan BPK sebagai auditor negara guna melakukan audit lebih mendalam jika diperlukan.

Selain itu, Danantara juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam berbagai aspek, seperti besaran dividen serta penyertaan modal negara (PMN).

"Dengan adanya pengawasan dari berbagai lembaga, tata kelola BPI Danantara dapat dikatakan

cukup kuat karena terdapat banyak pihak yang terlibat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan," pungkasnya.

Meski demikian, dia memandang bahwa tantangan utama ke depan terletak pada pengelolaan internal. Menurutnya, untuk memastikan keberhasilan, Danantara harus dipimpin oleh individu dengan jam terbang tinggi. Di samping itu,

integritas dan profesionalisme menjadi faktor krusial dalam menjaga tata kelola.

Toto turut menyoroti bahwa faktor terpenting adalah memastikan para pengelola Danantara terbebas dari kepentingan politik ataupun pihak-pihak tertentu, yang dapat memengaruhi keputusan strategis *superholding*.

"Jika semua persyaratan ini dapat dipenuhi maka tata kelola Danantara dapat berjalan dengan baik dan tetap netral, sehingga mampu berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian Indonesia," ucap.

Di sisi lain, Analisis Reliance Sekuritas Arifin menilai bahwa sejauh ini, respons pasar cenderung reaktif dan negatif disebabkan oleh sejumlah faktor. *Pertama*, pembentukan Danantara masih belum final. Terlebih, mantan Presiden Joko Widodo disebut-sebut ikut menjadi pengawas Danantara.

Selain itu, kata dia, Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan juga menyampaikan bahwa ke depannya, Danantara akan dapat melakukan JV. "Ini menunjukkan bahwa kebijakan struktural dan fiskal Danantara masih belum sepenuhnya jelas dan masih dalam tahap perumusan," katanya.

Selain itu kata Arifin, hingga saat ini, belum ada penunjukan langsung terhadap jajaran pejabat utama Danantara. Oleh karena itu, reaksi awal dari pelaku pasar masih cenderung negatif.

"Namun demikian, setelah terdapat kejelasan lebih lanjut terkait kebijakan pemerintah mengenai BPI Danantara, sentimen positif diper-

kirakan akan kembali mendorong pergerakan saham-saham BUMN."

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Danantara akan mengkonsolidasi berbagai aset dan kekuatan ekonomi perusahaan pelat merah agar pengelolannya lebih optimal.

"Optimalisasi pengolahan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional yang akan kita launching pada 24 Februari yang akan datang. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara," kata Prabowo di Istana Negara, Senin (17/2). ▢



Deretan SWF dengan Nilai Kelolaan Aset Terbesar di Dunia



Wewenang BPI Danantara

- Mengelola dividen *holding* investasi, dividen *holding* operasional, dan dividen BUMN
- Menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen;
- Bersama menteri BUMN membentuk *holding* investasi dan *holding* operasional
- Bersama menteri BUMN menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh *holding* investasi atau *holding* operasional
- Memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan mengagunkan aset dengan persetujuan presiden
- Mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR yang membidangi BUMN atas rencana kerja dan anggaran perusahaan *holding* investasi dan *holding* operasional

Dengan dana kelolaan atau *Asset Under Management* (AUM) yang diperkirakan sebesar US\$900 miliar, Danantara menjadi "pemain" yang cukup signifikan.

Secara global, Danantara akan menjadi *sovereign wealth fund* (SWF) dengan pengelolaan dana terbesar ketujuh di dunia

10 Besar SWF di Dunia Berdasarkan Aset

SWF	Aset (US\$ Miliar)
Norway Government Pension Fund Global	1.796,31
China Investment Corporation	1.332,07
SAFE Investment Company	1.090
Abu Dhabi Investment Authority	1.057,54
Kuwait Investment Authority	980
Public Investment Fund	925
GIC Private Limited	800
BPI Danantara	600
Qatar Investment Authority	526
Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio	514,34

Sumber: Berbagai sumber, diolah



Save & Share



BUMN di Bawah Kendali Danantara

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- PT PLN (Persero)
- PT Pertamina (Persero)
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
- Holding BUMN Pertambangan MIND ID

BISNIS/SINTIA NOVIZAH